

## **BAB IV**

### **ADVOKASI UNTUK AMANDEMEN KONSTITUSI**

Keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat penting untuk memberikan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diperoleh kaum perempuan. Keterwakilan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam parlemen menyebabkan perempuan merunut kembali berbagai hal yang menjadi masalah serta solusi yang harus diambil untuk mengakhiri ketimpangan yang terjadi. Munculnya konsep parity sebagai langkah efektif untuk mengakhiri representasi perempuan yang rendah dalam parlemen Perancis, membawa perubahan. Walaupun dengan presentase yang kecil namun representasi perempuan terus mengalami peningkatan. Keberhasilan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan dengan proses advokasi. Proses advokasi yang dilakukan mengupayakan terjadinya amandemen konstitusi, karena hanya dengan sebuah konstitusi perempuan akan terjamin hak-haknya.

#### **A. Perjuangan untuk Parity Law**

Parity mendapatkan dukungan yang sangat luas, baik dari masyarakat sipil, partai politik, aktivis feminis, akademisi, politisi sayap kiri dan politisi sayap kanan. Akan tetapi dukungan ini tidak menjamin perubahan kedudukan perempuan dalam politik ketika tidak ada langkah konkrit yang diperjuangkan.

Gambaran yang tidak terkoordinasi dan perjuangan yang tidak kontinu

menyebabkan gagalnya parity diterapkan. Sehingga, kaum feminis Perancis berupaya untuk menemukan cara-cara yang tepat guna terbentuknya parity law, dan ditetapkan sebagai sebuah konstitusi. Cara-cara ini dilakukan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen.

### **1. Proses Legislasi dan Yurisdiksi**

Advokasi dengan bentuk legislasi dan yurisdiksi dilakukan melalui usulan, tuntutan, gagasan hingga debat di parlemen. Hukum parity menjadi perhatian dari kalangan sarjana, aktivis, dan politisi yang tertarik pada gender dan representasi politik. Mereka tertarik tidak hanya dari tuntutan perwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dari argumen teori yang mengemuka selama kampanye. Inovasi ini tidak muncul sebagai respon sederhana untuk pertanyaan representasi perempuan yang rendah dalam politik Perancis, melainkan sebagai reaksi terhadap upaya yang sebelumnya gagal untuk mempromosikan kehadiran politik perempuan melalui kuota dan jenis lain reformasi pemilu.

Perdebatan dalam parlemen untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik terjadi sangat alot. Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan parity menjadi sebuah konstitusi sangatlah panjang. Debat untuk representasi keterwakilan perempuan dalam parlemen ini diawali dengan tuntutan kuota yang berupa usulan dari kaum feminis. Hingga tahun 1990-an, sebagian besar pekerjaan untuk meningkatkan representasi perempuan datang dari perempuan dalam berbagai partai politik, tanpa masukan dari gerakan perempuan dalam masyarakat

zivil. Sebagian besar dari upaya ini terkonsentrasi di dalam Partai Sosialis (PS) di

mana pihak pertama feminis mulai menuntut kuota gender awal tahun 1970. Pada konvensi partai nasional tahun 1974, dua anggota partai perempuan mengusulkan bahwa ketetapan Partai Sosialis diubah untuk memasukkan kuota 10 persen bagi perempuan, baik dalam posisi kepemimpinan partai dan para kandidat partai untuk jabatan politik. Mereka berpendapat bahwa penerapan kuota sangat konsisten dengan ideologi sosialis, akan mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Proposal tersebut mendapat dukungan bulat dari pihak yang bertanggung jawab untuk reformasi perundang-undangan dan kemudian disetujui oleh mayoritas delegasi untuk konvensi partai. Sebelum pemungutan suara yang mendukung ketentuan tersebut, delegasi mengubah persyaratan kuota sehingga akan berlaku hanya untuk pemilu yang diatur oleh Proporsional Representative, tidak termasuk pemilihan kepada *National Assembly* yang diputuskan oleh suara mayoritas dua putaran. Perempuan berupaya untuk memperluas ketentuan-ketentuan ini pada konvensi partai berikutnya dengan tujuan akhir meningkatkan kuota yang mencerminkan proporsi perempuan diantara anggota partai.

Pada tahun 1977 delegasi memutuskan untuk menaikkan kuota 15 persen, dan di tahun 1979 menaikkan kuota menjadi 30 persen untuk perempuan dalam pemilu di Parlemen Eropa (*European Parliament*), kuota 20 persen untuk perempuan dalam kepemimpinan partai, dan nominasi perempuan sebanyak mungkin untuk kabupaten pada pemilu mayoritas dua putaran. Pada tahun 1981 Véronique Neiertz, Sekretaris Nasional Hak Asasi Perempuan (*National Secretary for Women's Rights*), mengusulkan untuk meningkatkan kuota 30 persen perempuan dalam kepemimpinan partai dan kandidat partai dalam pemilihan PR

serta memperpanjang kuota 30 persen untuk pemilihan umum yang dijalankan oleh suara mayoritas. Pemimpin Partai menunda pembahasan proposal sampai konvensi partai berikutnya pada tahun 1982, di mana pernah disampaikan oleh pihak delegasi. Pada tiga kongres nasional tahun 1983 berikutnya 1985 dan 1987 Sekretaris Hak-Hak Perempuan Nasional (*National Secretary for Women's Rights*) yang baru, Martine buron, berulang kali menyerukan agar kuota yang sudah ada ditingkatkan menjadi 30 persen, tetapi semua usulan itu ditolak oleh delegasi partai. Pada tahun 1990, sejumlah perempuan di dalam partai mengulangi permintaan untuk meningkatkan kuota 30 persen, sementara yang lain mengusulkan kuota 40 persen dengan rencana untuk ditingkatkan menjadi 50 persen pada tahun 2000, bersama dengan pembentukan sebuah komisi untuk mengawasi pelaksanaan kuota. Pihak delegasi memilih untuk menaikkan kuota 30 persen, tidak ada ketentuan memperpanjang langkah-langkah tersebut untuk pemilihan mayoritas. Meskipun perhatian yang diberikan kepada kuota selama tahun 1970-an dan 1980-an, partai Sosialis jarang menerapkan salah satu kebijakan mereka sepenuhnya, hal ini dikarenakan partai tidak pernah membentuk mekanisme penegakan hukum untuk menjamin aplikasi mereka. Dalam beberapa kasus dilakukan perkiraan persentase kuota calon perempuan seperti pada tahun 1986, kebanyakan wanita dalam pemilihan daerah dan legislatif ditempatkan pada posisi mereka tidak mungkin dipilih, sehingga mengurangi dampak dari kuota. Pada saat perdebatan ini berlangsung, beberapa wanita di parlemen mengejar untuk meningkatkan representasi politik perempuan melalui kuota di tingkat lokal

Pada tahun 1975 Sekretaris Negara untuk Status Perempuan (*Secretary of State for Women's Status*), Françoise Giroud mengusulkan membatasi hingga 85 persen persentase calon dengan jenis kelamin yang sama pada daftar untuk pemilihan daerah kotamadya, ketentuan yang pada dasarnya sebesar kuota 15 persen untuk wanita. Pada tahun 1979 Menteri Status Perempuan dan Keluarga (*Minister of Women's Status and the Family*) yang baru, Monique Pelletier, mengusulkan agar permintaan ini diubah menjadi 80 persen dalam amandemen untuk reformasi pemilihan kota. Jumlah ini disetujui hampir dengan suara bulat di *National Assembly*, namun tidak pernah disetujui oleh *Senat* sebelum masa legislatif berakhir, hal ini dikarenakan pemerintah tidak menuntut perubahan yang kontroversial selama kampanye presiden 1980 hingga 1981.<sup>1</sup>

Partai Sosialis yang memiliki prinsip kuota gender, masuk ke dalam politik, saat pemerintah memutuskan untuk tidak menyertakan kuota bagi perempuan dalam Undang-undang dan akan memperkenalkan perwakilan semi-proporsional untuk pemilihan di tingkat kota. Pada tahun 1982, seorang wakil independen yang bergabung dengan Partai Sosialis, Gisle Halimi, mengusulkan agar daftar calon tidak melebihi 70 persen dari jenis kelamin yang sama, dan diterapkan pada setiap tiga posisi dalam daftar. Kelompok Sosialis di parlemen mengurangi tuntutan, yakni 75 persen tanpa pembatasan pada kandidat laki-laki dan perempuan. Pemerintah tidak percaya, mereka berpendapat bahwa partai-partai politik, harus memutuskan rasio kandidat laki-laki dan perempuan. Selama debat parlemen, Menteri Dalam Negeri Gaston Defferre berbicara atas nama

---

<sup>1</sup> Mona Lena Krook, "Competing Claims: Quotas for Women and Minorities in India and France" *United States* 2 10 September 2005. (Access 10 January 2011); sumber Washington

pemerintah, meminta memunculkan kuota sebagai artikel terpisah, jika Mahkamah Konstitusi membatalkannya, hukum yang lebih luas mungkin masih diterapkan. Saran ini memunculkan debat di antara deputi bahwa pengadilan akan menyatakan kuota tidak menjadi konstitusi, hal ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk menarik pemilih perempuan yang mendukung kuota, sehingga benar-benar tidak akan pernah diterapkan. Setelah memisahkan ketentuan kuota dari undang-undang utama, mereka memberikan suara mendukung. Beberapa bulan kemudian, seperti yang diharapkan, pengadilan meninjau Rancangan Undang-undang pemilihan kota. Awalnya difokuskan pada pasal-pasal lain dari yang menyediakan kuota, Dewan akhirnya mengambil artikel kuota dan menyatakan artikel kuota tersebut tidak akan menjadi konstitusi, dengan alasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar dan Pasal 6 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara bersama-sama menegaskan prinsip persamaan di depan hukum, menghalangi pembagian pemilih dan calon ke dalam kategori untuk semua jenis suara politik, termasuk pemilihan anggota dewan kota. Sedangkan feminis memberikan sedikit perhatian pada vonis ini karena banyak perempuan tidak nyaman dengan gagasan kuota 25 persen, menurut mereka perempuan merupakan lebih dari 50 persen populasi. Hal ini berdampak besar pada kampanye selanjutnya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik di Perancis. Keputusan tersebut menegaskan kembali interpretasi dari prinsip persamaan dihadapan hukum. Meskipun Pembukaan Konstitusi mencakup prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, semua keputusan Dewan Konstitusi

gender. Keputusan Dewan 1982, menghalangi upaya untuk menghasilkan lembaga kesetaraan melalui sarana spesifik gender. Keputusan ini mengakibatkan kaum feminis ragu menggunakan sarana hukum guna mempromosikan akses perempuan untuk jabatan politik, dan memaksa pendukung kuota untuk mengembangkan suatu kritik yang lebih mendasar dari prinsip persamaan sebagai akar penyebab perbedaan jenis kelamin dalam representasi politik.

Akibat keputusan Dewan Konstitusi 1982, upaya untuk meningkatkan kuota di dalam Partai Sosialis kehilangan kesempatan, selama beberapa tahun hanya sedikit kemajuan yang dibuat untuk meningkatkan representasi politik perempuan di tingkat nasional. Pada tahun 1986, feminis menjadi lebih optimis ketika sistem pemilu untuk pemilihan parlemen diubah dari dua putaran mayoritas menjadi perwakilan proporsional (*Proportional Representation*). Banyak aktivis perempuan berharap bahwa adopsi *Proportional Representation* secara substansial akan meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih, dan untuk alasan ini mereka tidak melakukan mobilisasi dalam partai-partai untuk memastikan bahwa perempuan ditempatkan teratas pada daftar calon. Akibatnya, perempuan mencapai 24,7 persen dari semua kandidat, namun persentase perempuan yang terpilih ke National Assembly naik hanya dalam jumlah kecil dari 5,3 persen menjadi 5,9 persen. Partai Sosialis merupakan partai yang paling mendekati kuota 20 persen, kandidat perempuan 18,9 persen, tetapi karena pemimpin partai menempatkan perempuan dibawah pada daftar calon, perempuan hanya 0,8 persen

Setelah pemilu 1993 kembali hanya 6,4 persen perempuan dalam Majelis Nasional, kegiatan yang mendukung parity dipenuhi dengan perdebatan, roundtables, konferensi, newsletter, dan bahkan demonstrasi di depan Majelis Nasional. Pada akhir tahun 1993, organisasi perempuan menyusun Manifesto dari 577 untuk Demokrasi Parity, referensi disampaikan ke sejumlah deputi dalam Majelis Nasional. Manifesto ini ditandatangani oleh 289 perempuan dan 288 laki-laki dari semua bidang politik, untuk menuntut penggabungan parity ke dalam konstitusi nasional. Pihak sayap kiri mengumumkan mereka akan menerapkan parity dalam daftar mereka untuk pemilu mendatang pada tahun 1994. Selanjutnya, para deputi mengajukan proposal di Majelis Nasional untuk melembagakan parity atau setidaknya memastikan perwakilan politik yang lebih besar bagi perempuan. Meskipun Presiden François Mitterrand menyatakan keraguan tentang kuota, Francois setuju bahwa peningkatan dramatis tidak mungkin terjadi pada diri mereka sendiri.

Pada tahun 1996, sepuluh politisi perempuan terkemuka datang dan menyampaikan proposal mereka guna mencapai perwakilan yang sama. Dokumen ini menyerukan tindakan sukarela dalam partai politik untuk hukum parity, ekspansi dan penggunaan proportional representatif, penurunan dalam penguasaan kantor, pembiayaan publik bagi pihak yang menghormati parity, serta referendum amandemen konstitusi untuk memperkenalkan tindakan afirmatif. *L'Express* mengungkapkan hasil jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa 71 persen dari populasi Perancis, dengan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, akan mendukung hukum atau amandemen konstitusi guna mendirikan perwakilan



yang sama. Makalah ini juga termasuk wawancara Juppé dan Lionel Jospin, pemimpin Partai Sosialis, keduanya mendukung amandemen konstitusi dan referendum untuk menetapkan langkah-langkah untuk mempromosikan perempuan dalam politik. Pendukung berpendapat bahwa pemahaman kesetaraan dan representasi sebagai warga negara universal yang awalnya hanya dianggap berlaku bagi kaum laki-laki saja. Akan tetapi tidak seperti anggapan tersebut yang mana, perempuan juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Agar tidak meninggalkan konsep ini sepenuhnya, para pendukung mengusulkan reformasi konstitusi untuk menyediakan perwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik. Dengan alasan, inilah satu-satunya cara untuk mengenali secara eksplisit dari dua jenis kelamin dari warga universal.

Penetapan parity sangat penting bagi kesejahteraan umum masyarakat, mereka mengklaim, 'seks' menyebabkan perbedaan universal antara manusia, sebuah penghalang untuk menjadikan perempuan terwakili dalam berbagai bidang di masyarakat. Kebijakan ini berbeda secara fundamental dari mendirikan kuota, karena kuota tersirat hak perwakilan khusus untuk kaum minoritas, sementara paritas hanya menyerukan pembagian yang adil kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dua bagian dari ras manusia.

Setelah terpilihnya Presiden Jaques Chirac, Alain Juppe ditunjuk sebagai Perdana Menteri yang mengawasi daftar jumlah calon perempuan untuk Kabinet. Selain mengawasi penerapan Parity, mereka mempelajari dan mengembangkan strategi untuk menunjang representasi perempuan dalam politik. Akan tetapi

... dalam politik menyalahi penurunan dari 27,0 persen menjadi

12,5 persen. Penurunan ini tidak menyurutkan langkah para pendukung Parity, mereka terus mengadakan lobi untuk mereformasi hukum. Presiden Chirac dan Perdana Menteri Juppe mengambil inisiatif yang lebih nyata. Survey 1997 menunjukkan 75 persen dari wakil di Nasional Assembly menentang dimasukkannya Parity dalam Konstitusi, penolakan ini datang dari mayoritas partai RPR dan UDF. Dalam debat ini, Juppe menegaskan akan terus mendukung langkah-langkah positif untuk memajukan representasi perempuan. Juppe menyarankan untuk mengurangi permintaan Parity dimasukkan dalam konstitusi, bentuk tindakan ini dilakukan agar mendorong kandidat perempuan.

Jaques Chirac kembali memberikan kejutan pada masa kepemimpinannya, ia mengumumkan diadakannya pemilu yang lebih cepat dari jadwal seharusnya. Yang mengejutkan lagi, kandidat perempuan lebih banyak diajukan dari partai sayap kiri Perancis, antara 26,8 persen dan 32,3 persen. Sedangkan dari partai sayap kanan mencalonkan 7,7 persen meningkat menjadi 12,1 persen. Akibatnya 42 dari 63 perempuan yang terpilih merupakan anggota dari Partai Sosialis yang merupakan partai Sayap Kiri. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan 10,9 persen dibandingkan persentase sebelumnya. Pemilihan yang diadakan lebih cepat dari jadwalnya ini menunjuk Jospin sebagai Perdana Menteri baru. Jospin mengumpulkan 30 persen perempuan untuk kabinet baru dan mengumumkan rencananya untuk mengadakan perubahan, yakni memasukkan Parity dalam konstitusi.<sup>3</sup> Hal ini mempengaruhi Chirac sebagai Presiden pada saat itu untuk mendukung reformasi konstitusi jika tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk

menjamin akses perempuan dalam politik. Dengan dukungan itu pergerakan Parity di Perancis menjadi konstan, dan menjadi topik utama dari diskusi yang lebih luas tentang reformasi untuk memodernisasi politik Perancis, seperti untuk penguatan demokrasi lokal, mengakhiri dominasi perkantoran, dan memperkenalkan reformasi sistem pemilu terbatas.

Komitmen tentang Parity dari kedua pemimpin Perancis kembali ditegaskan. Ini terbukti pada Maret 1998, yakni Hari Perempuan Internasional mereka mengejar amandemen konstitusi Parity dalam hal tanggung jawab Politik, Ekonomi dan Sosial. Menurut Perdana Menteri Jospin, Pasal 1 merupakan pasal yang tepat karena menegaskan prinsip-prinsip Republik Perancis dan menjamin kesetaraan di depan hukum. Perdana Menteri menyampaikan usulan ini kepada Presiden yang memiliki kekuasaan mengubah konstitusi bersama anggota Parlemen. Usulan ini ditanggapi secara serius oleh kepala negara. Pasal 1 mendukung pasal 34 yang menjelaskan hanya daftar kecil wilayah kebijakan dan hanya dewan legislatif yang dapat membuat hukum. Pada dasarnya, tanggung jawab politik, ekonomi dan sosial sudah tercantum dalam pembukaan konstitusi, hal ini disampaikan oleh Dewan Negara. Chirac menyetujui untuk merubah pasal 3, yang menguraikan hak-hak dasar warga negara dalam kaitannya dengan kedaulatan nasional. Perubahan pasal 3 tersebut mengharuskan Perdana Menteri Jospin untuk memperkenalkan sistem Pemilihan baru untuk National Assembly, yang merupakan salah satu komitmen politik Perancis.

Perubahan Amandemen dibacakan pertama kali di National Assembly pada Desember 1998. Akan tetapi perubahan ini memunculkan pendapat yang

menimbulkan perdebatan. Menteri Kehakiman Perancis Elisabeth Guigou berpendapat, bahwa reformasi pasal 3 tidak akan memperkenalkan masalah tentang jenis kelamin ke dalam politik, namun akan mengakhiri pengecualian politik, dengan demikian akan menyadari sepenuhnya tujuan revolusi Perancis. Ia mengkritik keputusan Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) 1982, untuk mengabaikan pembukaan konstitusi yang menjamin persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Tuntutan dirasa tidak berlebihan dan akan memberikan sumbangan untuk prinsip kesetaraan. Mahkamah Konstitusi telah memberikan jalan untuk tindakan yang menunjukkan prinsip kesetaraan, dimana pada Januari 1997 para legislator memiliki kewajiban untuk mengambil langkah yang tepat untuk mencegah penyimpangan. Selain itu pasal 141 dari Traktat Amsterdam yang memiliki status konstitusional di semua negara Uni Eropa dan akan mulai berlaku pada Mei 1999, memungkinkan mereka untuk menggunakan tindakan-tindakan positif guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan.

Sesuai prosedur untuk meratifikasi Amandemen Konstitusi, kedua Majelis Parlemen bertemu di Versailles pada Juli 1999 dan menyetujui ketentuan sebagaimana undang-undang konstitusi 99-569. Amandemen Konstitusi pada pasal 3 dan 4 ditetapkan pada 28 Juni 1999.<sup>4</sup> Perdebatan tentang reformasi hukum Pemilu untuk menetapkan dan menegakkan akses yang sama terhadap mandat pemilihan dan fungsi pilihan. Banyak kekecewaan terjadi karena tuntutan difokuskan pada pencalonan kandidat perempuan, bukan pada proporsi perempuan yang terpilih, dan membuat ketentuan yang lemah untuk National

---

<sup>4</sup>*French Women and Politics: Long Road to Parity* (okas. 09 Januari 2011); sumber

Assembly. Hal itu mengakibatkan persentase perempuan yang rendah, menginspirasi kampanye Parity. Lebih khusus lagi undang-undang tersebut memberi persyaratan yang berbeda untuk berbagai jenis pemilihan umum, sesuai dengan jenis sistem Pemilu yang digunakan. Pemilu yang dilaksanakan di bawah *proporsional representative*, rancangan undang-undang yang dibutuhkan adalah daftar alternatif antara perempuan dan laki-laki dalam Pemilu satu putaran. Parity dari enam calon dengan tiga laki-laki dan tiga perempuan dalam urutan apapun pada pemilihan dengan dua putaran. Dalam pemilihan ini, hukuman yang diberikan kepada partai politik yang tidak patuh adalah penolakan daftar kandidat. Partai tidak diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Untuk Pemilu dengan suara mayoritas dua putaran, peraturan mengamanatkan bahwa calon laki-laki dan perempuan masing-masing representasinya harus 50 persen dalam semua pemilihan. Sanksi yang diberikan adalah kehilangan dana, sejumlah setengah dari persentase laki-laki dan perempuan.

## **2. Proses Politik dan Birokrasi**

Advokasi kedua yang digunakan untuk mempengaruhi parity law adalah proses-proses politik dan birokrasi. Proses ini dilakukan oleh kaum feminisme dengan melakukan lobi, negosiasi, mediasi, serta kolaborasi. Peran partai politik, organisasi perempuan dalam lingkup nasional bahkan organisasi internasional, sangat membantu dalam mempengaruhi representasi perempuan dalam parlemen Perancis. Advokasi yang dilakukan dengan proses politik dan birokrasi diawali dengan masuknya pendukung feminisme dalam partai politik, yakni partai Sosialis dan Partai Green Perancis. Melalui Partai politik mereka berusaha menerapkan

landasan Parity dalam prinsip dasar partai. Kegagalan acap kali dialami oleh pendukung feminis, oleh karena itu mereka berinisiatif untuk bergabung dalam gerakan diluar partai mereka. Hal ini dilakukan agar terbentuk landasan hukum yang kuat untuk representasi perempuan di parlemen.

Bentuk gerakan diluar partai ketika mereka bekerjasama dengan negara Eropa lainnya yang tergabung dalam Council of Europe. Dewan Eropa (*Council of Europe/COE*) memulai serangkaian perdebatan mengenai pendalaman dan penguatan demokrasi di Eropa. Berbeda dengan Uni Eropa (UE), yang pada akhir 1980-an difokuskan pada hak-hak individu sebagai pelaku ekonomi, COE telah lama bekerja untuk mempromosikan hak-hak individu sebagai aktor politik. Pada tahun 1986 COE menyelenggarakan Konferensi Menteri Eropa untuk Kesetaraan Antara Perempuan dan Laki-laki (*European Ministerial Conference on Equality Between Women and Men*) pertama, di mana negara anggota yang mampu meningkatkan kehadiran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik merupakan ciri utama demokrasi dan keadilan sosial. Pada tahun 1988, mereka menandatangani Deklarasi Kesetaraan Perempuan dan Pria (*Declaration of Equality of Women and Men*) menyerukan COE untuk merancang kebijakan dan strategi untuk mengintegrasikan perempuan ke semua tingkat kehidupan politik. Untuk tujuan ini, Komite Eropa untuk Kesetaraan Antara Perempuan dan Pria (*European Committee for Equality Between Women and Menor CEEG*) mengadakan seminar ahli di Strasbourg pada tahun 1989 untuk berbagi dan mengembangkan mekanisme untuk mempromosikan akses perempuan ke dalam

Halvorsen, menguraikan pengalaman Norwegia membawa lebih banyak perempuan ke dalam politik, dan Elisabeth Sledziewski, menguraikan argumen baru untuk meningkatkan kehadiran politik perempuan berdasarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun perdebatan ini menggambarkan pengertian mengenai perbedaan jenis kelamin yang lebih luas, serta beragam preferensi tentang Partai Politik, menurut undang-undang kuota sebagian besar hasil dari pertemuan ini menyatakan demokrasi parity, tidak hanya sebagai sebuah konsep baru dalam politik Eropa tetapi juga sebagai satu set argumen inovatif untuk membenarkan tindakan positif mempromosikan perempuan dalam politik. Banyak ide-ide yang dirumuskan oleh Sledziewski sebagai perangkat bagi demokrasi, sifat ganda dari ras manusia, dan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali gagasan yang sudah ada, inspirasi tentang kesetaraan bagi perempuan di Perancis. Tidak hanya cara-cara baru untuk mengatasi Konstitusi keputusan Dewan 1982, tetapi juga mengakui bahwa dukungan COE untuk demokrasi parity bisa memberikan legitimasi penting bagi upaya mereka meningkatkan representasi politik perempuan.

COE, merupakan sarana mediasi yang sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan untuk mendapatkan dukungan memperjuangkan parity. Selain itu, kaum feminis Perancis mendesak presiden mengeluarkan bentuk kebijakan. Initerbukti ketika Jacques Chirac terpilih sebagai Presiden, Alain Juppé ditunjuk sebagai perdana menteri yang mengawasi jumlah calon perempuan untuk kabinet. Mereka membentuk *Observatoire pour la Parite* (Observatorium untuk Parity),

yang merupakan lembaga negara guna mempelajari dan mengembangkan strategi

tentang perempuan dalam politik. Meskipun proporsi perempuan dalam kabinet segera turun drastis dari 27,9 persen menjadi 12,5 persen, pendukung parity terus melakukan lobi untuk mereformasi hukum.

Selama tahun 1990-an, gerakan perempuan menyadari manfaat betapa pentingnya bekerjasama dengan partai politik, yang mendukung dalam hal penerapan kuota. Partai-partai politik bertanggung jawab untuk memajukan jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Advokasi melalui proses politik dan birokrasi melalui lobi, mediasi, negosiasi yang terjadi dalam tubuh partai politik, hingga parlemen menghasilkan perubahan kebijakan yang menerapkan parity.

### **3. Proses Sosialisasi dan Mobilisasi**

Advokasi yang ketiga yakni proses sosialisasi dan mobilisasi. Proses advokasi ini ditandai dengan terjadinya mogok, demonstrasi, pembentukan massa. Siaran pers, demonstrasi dan kampanye yang dilakukan sangat berpengaruh besar untuk memperoleh kekuatan massa, dampak yang dihasilkan cukup besar dan mempengaruhi pemerintah. Peringatan dua abad Revolusi Perancis pada tahun 1989, memicu terbitnya buku yang menghubungkan ketidakhadiran perempuan dalam politik dan bidang lainnya pada Revolusi, terutama prinsip mengenai warga negara yang universal. Hidupnya kembali sejarah feminisme Perancis, difokuskan pada pengecualian yang melekat dalam republik Perancis dan dianut oleh feminis yang sebelumnya menyerukan perwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam politik. Pada tahun 1990 asosiasi parity pertama dibentuk oleh Régine



Saint-Criq, seorang mantan anggota dewan daerah yang telah meninggalkan Partai Sosialis karena kegagalan terus-menerus untuk menerapkan kuota dalam partainya sendiri. Sejumlah organisasi serupa muncul dalam suksesi yang sangat cepat. Setelah publikasi 1992, *citoyennes pouvoir Au! Liberté, Egalité, parité*, sebuah manifesto memproklamkan diri bagi gerakan parity di Perancis. Selain memperkenalkan istilah parity ke masyarakat luas, buku yang diterbitkan oleh Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber, dan Anne Le Gall tahun 1992, ini membahas alasan mengapa perempuan kurang terwakili dalam politik dan pemilu, untuk memperbaiki situasi ini, mereka mengusulkan agar parity tertulis dalam hukum untuk pemilihan di *National Assembly*, di tingkat regional serta tingkat nasional, yang terdiri dari banyak wanita dan laki-laki. Tulisan ini memberi dampak semua perempuan di perancis mulai membangun asosiasi parity yang baru, merupakan kelompok-kelompok perempuan dalam masyarakat sipil dan partai politik telah menerapkan tujuan parity. Masalah parity merupakan masalah yang sangat penting dan menjadi perdebatan politik utama selama pemilihan presiden 1995 untuk mendapatkan komitmen dari semua kandidat utama untuk jenis reformasi politik.

Pengorganisasian yang dilakukan kaum pendukung, terlihat dari dibentuknya organisasi perempuan yakni Rainbow, organisasi ini berjuang untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Gerakan Rainbow terbentuk antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1988, organisasi ini sangat keras memperjuangkan parity atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua bentuk pengambilan keputusan. Ketika kelompok ini diberkukan

pada tahun 1988, banyak aktifis yang bergabung dengan Partai Green yang menerapkan prinsip Paritas dalam anggaran dasar partai. Setelah Pemilu 1989 mereka kemudian menerapkan prinsip ini untuk semua partai politik.

Tingkat pengerahan massa dapat terlihat pada tahun 1990, gerakan pendukung parity melakukan demonstrasi di depan National Assembly. Hal ini dilakukan agar pemerintah mau mendengarkan tuntutan mereka. Sebelumnya demonstrasi sering digunakan untuk menuntut hak perempuan dalam berbagai hal, bahkan revolusi Perancis untuk memperoleh hak pilih dan kesempatan yang sama dalam politik.

Kaum perempuan memberikan tekanan terhadap partai politiknya terkait masalah Parity. Pemimpin partai Sosialis Jospin pada Mei 1996 mengumumkan setidaknya 30 persen kandidat perempuan untuk tahun 1998 dalam pemilu legislatif, kuota partai digunakan untuk pemilihan mayoritas dua putaran. Pada awalnya pemimpin partai berpendapat tidak akan mudah untuk menemukan perempuan yang cocok, dilihat dari segi kemampuannya. Perkiraan ini ternyata meleset karena pada Februari 1997 partai menyetujui daftar 167 calon perempuan dan merupakan angka yang lebih dari 30 persen.

## **B. Representasi Perempuan Setelah Amandemen Konstitusi**

Pada Maret 2000, Senat Perancis merubah versi pemilihan sehingga meningkatkan jumlah perempuan dalam National Assembly. Begitupula dengan Senat, mereka juga merenovasi sedikit versi pemilihan sehingga mempengaruhi

keseimbangan antara jenis kelamin di Parlemen. Promosi hukum dari Amandemen Konstitusi pasal 3 dan 4, tentang persamaan untuk laki-laki dan perempuan dalam pemilihan diadopsi pada 6 Juni 2000. Hukum tersebut mengatakan semua pihak harus memastikan bahwa 50 persen dari kandidat mereka adalah perempuan, dan apabila jumlah ini tidak tercapai maka pihak terkait akan mendapatkan sanksi keuangan. Undang-undang ini tentunya menjadi kendala bagi partai kecil. Akan tetapi tidak untuk partai besar di Perancis, mereka lebih memilih untuk membayar denda daripada memenuhi jumlah calon yang sama dalam Pemilihan Nasional. Karena alasan tersebut, aplikasi pada Pemilu tahun 2002 mengabaikan jumlah wakil perempuan. Keadaan ini mengundang kritik dari Menteri Kesetaraan Gender, Catherine Vautrin yang mengatakan perempuan harus menggunakan semua cara yang akan memungkinkan mereka ikut bertanggung jawab dalam segala posisi.

Parity merupakan persyaratan hukum untuk dipatuhi oleh Partai Politik, akan tetapi sistem pemilihan mayoritas yang digunakan untuk Pemilu Legislatif mengakibatkan hukum ini sulit diterapkan. Berbeda halnya jika menggunakan versi perwakilan proporsional, yang dapat menolak daftar partai. Pada Pemilu pertamalah diberlakukannya hukum Parity pada tahun 2002 jumlah persentase perempuan dalam politik dipenuhi oleh tiga partai politik (lampiran 2). Banyak partai besar yang lebih memilih membayar sanksi keuangan daripada memenuhi kandidat perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, pertama mengapa partai besar tersebut lebih memilih untuk membayar denda, dan pertanyaan kedua yang muncul adalah apakah cara tersebut merupakan strategi yang berkelanjutan untuk

menghadapi pemilu. Pernyataan tentang kemapanan menjadi kendala utama untuk menerapkan parity secara menyeluruh. Tingkat kemapanan yang selalu didominasi laki-laki mengakibatkan sulitnya mendapatkan calon kandidat perempuan yang memiliki kemapanan untuk mendukung mereka dalam politik. Penyebab yang kedua, sulitnya mengajukan kandidat perempuan yang memiliki pengaruh untuk menarik pemilih dan mencapai target pemilih yang dibutuhkan suatu partai. Yang ketiga, kurang tersedianya perempuan yang memiliki kemampuan memadai sebagai kandidat. Kurangnya ketersediaan dari berbagai kalangan untuk memberikan jalan bagi kandidat perempuan untuk berkecimpung dalam politik. Pemikiran bahwa perempuan tidak akan sanggup untuk bernegosiasi dengan partai koalisi. Semua hal tersebut menjadikan partai politik memikirkan kelangsungan dari kinerjanya sehingga mereka memilih untuk diberikan sanksi.

Partai-partai besar di Perancis dengan sangat mudah mampu menerima sanksi keuangan. Sanksi yang diberikan bukan masalah yang besar untuk mereka, berbeda halnya dengan partai kecil. Dari partai sayap kanan UMP (Union for a Popular Movement) dan UDF (Union for French Democracy), memberikan kurang dari 20 persen kandidat perempuan. Dari sayap kiri, yakni partai Sosialis hanya memberikan 36 persen kandidat perempuan. Sedangkan partai yang mampu memenuhi hukum Parity adalah partai Komunis dan partai Greens.

Diberlakukannya hukum Parity walaupun terjadi pelanggaran dalam memenuhi daftar calon, cara ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan representasi perempuan. Di parlemen Eropa tahun 1999, dengan jumlah anggota

35 dari keseluruhan 87 orang, presentase perempuan mencapai 40,2 persen. Sistem pemilihan yang digunakan adalah perwakilan proporsional. Peningkatan jumlah juga dialami dalam Majelis Nasional, dengan sistem pemilihan dua putaran representasi perempuan pada tahun 2002 mencapai 12,3 persen dengan anggota sebanyak 71 dari 577 anggota. Begitupula dalam Senat, mencapai 10,9 persen yakni 35 dari 321 anggota dengan sistem pemilihan daftar proporsional.<sup>5</sup>

Sistem pemilihan yang digunakan sangat menentukan jumlah. Sistem dengan daftar proporsional lebih menjanjikan untuk meningkatkan jumlah perempuan jika dibandingkan dengan sistem pemilihan mayoritas. Sistem pemilihan dengan daftar proporsional mensyaratkan, apabila partai tidak memenuhi hukum Parity maka daftar partai dapat ditolak. Walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan Parity, jumlah perempuan meningkat hampir dua kali lipat di dewan lokal kota dengan penduduk lebih dari 3.500 jiwa dan mewakili 47,5 persen dari anggota Dewan.<sup>6</sup>

Kondisi terakhir representasi perempuan dalam pemilihan tahun 2007, Perancis masih sangat jauh dari keterwakilan 50 persen. Perancis menduduki tempat ke 65 di dunia dengan representasi 21,9 persen dalam senat (lampiran: Woman in National Parlemen).

---

<sup>5</sup> *Melembagakan Paritas: Pengalaman Prancis* (akses 23 Februari 2011); sumber [http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS-French\\_Exp-sineau.pdf](http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS-French_Exp-sineau.pdf)

<sup>6</sup> Mona Lena Krook, "Competing Claims: Quotas for Women and Minorities in India and